



Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Nunek Viktor Bame¹, Ali Imran², Aryati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe,
Indonesia

E-mail: nunekvictorbame@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 10, 2026

Revised October 19, 2026

Accepted October 30, 2026

Keywords:

Local Government Size,
Financial Performance, Total
Assets, Efficiency Ratio, Panel
Data Regression

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local government size on the financial performance of regency governments in Southwest Papua Province. Local government size is measured using the natural logarithm of total assets, while financial performance is measured using the regional financial efficiency ratio, calculated by comparing actual regional expenditures to actual regional revenues. This study employs a quantitative approach with an associative research design. The data used are secondary data obtained from the financial statements of regency governments for the 2020–2024 period. Data collection is conducted through documentation, while data analysis uses panel data regression with the assistance of EViews software. The analysis includes panel data regression model selection, partial testing (t-test), and the coefficient of determination (R^2) to examine the effect of local government size on financial performance. This study is expected to provide empirical evidence regarding the relationship between local government size and financial performance, as well as serve as a reference for regency governments in optimizing regional asset and budget management to improve the efficiency and accountability of regional financial management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 10, 2026

Revised October 19, 2026

Accepted October 30, 2026

Kata Kunci:

Ukuran Pemerintah Daerah,
Kinerja Keuangan, Total Aset,
Rasio Efisiensi, Regresi Data
Panel

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan kinerja keuangan diukur melalui rasio efisiensi keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten selama periode 2020–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Pengujian dilakukan melalui pemilihan model regresi data panel, uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan, serta menjadi bahan



pertimbangan bagi pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan anggaran daerah guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nunek Viktor Bame

Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: nunekvictorbame@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama keberhasilan otonomi daerah di Indonesia. Sejak desentralisasi fiskal digulirkan, pemerintah daerah memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggarannya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah tidak lagi dinilai semata dari besarnya anggaran, tetapi dari efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaannya. Tuntutan tersebut semakin kuat karena publik dan lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menempatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, kinerja keuangan menjadi cerminan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Meskipun reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade, banyak pemerintah daerah masih menghadapi masalah struktural yang sama, yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini berkaitan erat dengan ukuran pemerintah daerah, yang lazim diproksikan melalui total aset, total pendapatan, atau skala organisasi perangkat daerah. Secara teoretis, semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah, semakin besar pula sumber daya administratif dan finansial yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan (Zamzami & Rakhman, 2023). Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara rutin mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mengelompokkan daerah berdasarkan kapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah (BSKDN, 2024). Namun, empat provinsi Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya, belum dapat diukur dalam IPKD karena dokumen APBD-nya masih berbentuk peraturan kepala daerah dan belum memiliki kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan yang dipersyaratkan.

Kesenjangan kapasitas fiskal antarwilayah tampak jelas ketika daerah di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah di Papua. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat mencatat bahwa dukungan dana transfer APBN terhadap APBD di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 93,2 persen dari total pendapatan daerah, suatu angka yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah menggali PAD masih sangat terbatas (RRI, 2026). Struktur belanjanya pun masih didominasi belanja rutin: belanja barang dan jasa menyerap 32,9 persen dan belanja pegawai 28,5 persen dari APBD, sementara belanja modal



yang produktif bagi pembangunan jangka panjang memperoleh porsi yang relatif lebih kecil (Tabel 1).

Tabel 1. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya

Indikator	Nilai
Rasio dana transfer APBN terhadap total pendapatan daerah	93,2%
Porsi belanja barang dan jasa terhadap APBD	32,9%
Porsi belanja pegawai terhadap APBD	28,5%

Sumber: Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat, dikutip dalam RRI (2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal bukan sekadar isu administratif, melainkan tantangan struktural yang berpotensi menghambat kualitas kinerja keuangan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Provinsi ini resmi terbentuk pada akhir 2022 sebagai hasil pemekaran Provinsi Papua Barat, dengan Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi. Pembentukan provinsi baru membawa konsekuensi berupa peningkatan beban administratif, penambahan perangkat daerah, dan tuntutan pelayanan publik yang lebih kompleks. Perubahan skala kelembagaan yang terjadi hampir serentak di seluruh kabupaten dan kota pascapemekaran inilah yang menjadikan ukuran pemerintah daerah relevan untuk diteliti, sebab pertumbuhan organisasi pemerintahan yang cepat tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang setara di seluruh wilayah.

Opini audit BPK sering dijadikan rujukan untuk menilai pengelolaan keuangan daerah. Kota Sorong, misalnya, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2023 hingga 2025, dan pada 2024 opini tersebut merupakan yang ketujuh secara berturut-turut. Akan tetapi, opini audit hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak menggambarkan seluruh dimensi kinerja keuangan, seperti efisiensi penggunaan belanja, kemampuan merealisasikan pendapatan, dan tingkat kemandirian fiskal. Karena itu, penelitian ini memakai indikator keuangan yang ditetapkan dalam definisi operasional agar kinerja dapat dibandingkan secara konsisten antarkabupaten.

Perbedaan ukuran dan kapasitas fiskal antarkabupaten di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa besarnya sumber daya yang dikelola belum tentu menghasilkan kinerja keuangan yang sama. Kajian mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan sendiri telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya belum konsisten. Zamzami dan Rakhman (2023) serta Setiawan dan Winarna (2022) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan menjadi determinan signifikan kinerja. Sebaliknya, Millenia (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dan Banunaek dkk. (2022) menegaskan bahwa hubungan keduanya masih menjadi perdebatan empiris yang belum tuntas. Pada level internasional, Swianiewicz dkk. (2025) melaporkan bahwa efek skala lebih terasa pada pemerintahan lokal berukuran kecil yang baru terbentuk, sedangkan Soares dkk. (2025) menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran municipal di Portugal cenderung menurun seiring waktu meski kapasitas administratif membesar. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan ukuran dan kinerja bersifat kontekstual, bukan linear universal.

Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah dengan karakteristik fiskal yang berbeda dari Tanah Papua, dan kajian yang secara khusus membandingkan pemerintah kabupaten di Papua Barat Daya masih terbatas. Proksi ukuran pemerintah daerah juga belum beragam: sebagian peneliti memakai total aset, sebagian total pendapatan, dan sebagian lagi belanja daerah. Kondisi ini membuka ruang untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah



yang diproksikan dengan total aset terhadap kinerja keuangan pada lima pemerintah kabupaten di Papua Barat Daya selama 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya? Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah menganalisis dan menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.

1.3 Kontribusi dan Kebaruan

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian ini mengarahkan perhatian pada wilayah frontier Indonesia yang sedang mengalami transisi kelembagaan akibat pemekaran provinsi, konteks yang jarang tersedia dalam literatur akuntansi sektor publik nasional. Kedua, penelitian ini memperkaya diskusi teori ukuran organisasi pemerintahan dengan membandingkan konteks daerah otonomi baru di Indonesia dengan temuan internasional tentang efek skala pada pemerintahan lokal hasil pemekaran (Swianiewicz dkk., 2025). Ketiga, penelitian ini menyajikan kerangka analisis data panel yang lengkap dan dapat direplikasi, mulai dari pemilihan model hingga uji asumsi, yang dapat langsung dijalankan ulang ketika data LKPD aktual tersedia. Manfaat praktisnya adalah bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menyesuaikan pengelolaan sumber daya keuangan dengan skala pemerintahan yang dimiliki.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa angka-angka dalam bagian hasil bersumber dari data simulasi. Penelitian ini karena itu diposisikan sebagai demonstrasi prosedur analisis dan uji kelayakan metodologis, bukan sebagai laporan temuan empiris tentang kondisi riil keuangan kabupaten-kabupaten tersebut.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent) dalam pengelolaan sumber daya. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu pihak memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan dan mengambil keputusan atas namanya. Karena agent biasanya memiliki informasi yang lebih banyak tentang pelaksanaan tugas, timbul asimetri informasi dan peluang perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Eisenhardt (1989) merangkum dua persoalan utama dalam teori ini, yaitu perbedaan tujuan antara principal dan agent serta kesulitan principal memastikan tindakan agent akibat perbedaan informasi.

Dalam pemerintahan daerah, masyarakat dapat dipandang sebagai principal yang memberi mandat kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik dan menyelenggarakan pelayanan. Pemerintah daerah menentukan kebijakan, mengelola anggaran, mengalokasikan sumber daya, dan melaksanakan program pembangunan, sehingga memiliki akses informasi keuangan yang jauh lebih besar daripada masyarakat. Karena masyarakat tidak terlibat langsung dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, diperlukan laporan keuangan, pengukuran kinerja, pemeriksaan, dan mekanisme transparansi untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut (Egbon dkk., 2023). Penerapan di sektor publik ini berbeda dari organisasi bisnis, sebab tujuan akhirnya adalah akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik, bukan semata maksimalisasi laba.

Pengukuran kinerja keuangan menjadi salah satu instrumen akuntabilitas dalam hubungan keagenan tersebut. Kinerja keuangan memberi informasi kepada principal untuk menilai apakah



mandat telah dijalankan secara memadai. Muafiq dan Chariri (2023) menempatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam kerangka yang sejalan, sehingga teori keagenan relevan untuk menjelaskan mengapa karakteristik pemerintah dan kualitas pengelolaan sumber daya berkaitan dengan capaian kinerja keuangan.

Teori keagenan juga relevan untuk menjelaskan peran ukuran pemerintah daerah sebagai karakteristik organisasi. Pemerintah daerah dengan skala sumber daya yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi juga memikul tanggung jawab pertanggungjawaban yang lebih besar. Ukuran yang besar tidak otomatis menjamin kinerja yang lebih baik: peningkatan skala organisasi dapat diikuti meningkatnya kompleksitas pengelolaan, kebutuhan koordinasi, jumlah program, dan volume sumber daya yang harus dikendalikan. Dalam perspektif keagenan, semakin kompleks organisasi, semakin besar kebutuhan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila kapasitas pengelolaan tidak berkembang sejalan dengan ukuran, tambahan sumber daya justru dapat menimbulkan persoalan baru. Pandangan ini sejalan dengan Sumardjo dan Jayanti (2021) yang menempatkan *government size* sebagai salah satu karakteristik pemerintah daerah yang berkaitan dengan kinerja keuangan, serta dengan penelitian-penelitian lain yang menggunakan teori keagenan sebagai dasar, seperti Meilanda dkk. (2023) dan Fatimah dan Rizal (2026).

2.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah karakteristik yang menggambarkan besar kecilnya skala organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya. Ukuran ini berbeda dari ukuran wilayah geografis maupun jumlah penduduk: dalam penelitian keuangan daerah, konsep ukuran diarahkan pada skala organisasi dan sumber daya ekonomi yang dikelola. Pemerintah daerah dengan aset, pendapatan, atau belanja yang lebih besar dikategorikan memiliki ukuran organisasi yang lebih besar. Nasirwan dkk. (2024) menempatkan ukuran pemerintah sebagai salah satu faktor penjelas kinerja keuangan, dan Maheresmi dan Rokhimah (2026) memasukkan *government size* bersama belanja modal dan ukuran legislatif sebagai variabel yang diuji terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi periode 2022–2024.

Beberapa proksi dapat digunakan untuk mengukur ukuran pemerintah daerah, yakni total aset, total pendapatan, dan total belanja. Total aset menggambarkan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah, total pendapatan menunjukkan penerimaan dalam satu periode anggaran, dan total belanja menunjukkan sumber daya yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan. Penelitian ini memilih total aset karena aset memotret seluruh sumber daya yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah, bukan hanya arus pendapatan atau pengeluaran pada satu periode. Pemilihan ini juga menghindari tumpang tindih mekanis dengan variabel kinerja yang dibentuk dari realisasi pendapatan dan belanja. Aset daerah dapat berupa aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya, dan datanya tersedia dalam LKPD.

Karena nilai total aset sangat besar dan rentangnya lebar, pengukuran dilakukan dengan logaritma natural untuk memperkecil perbedaan skala dan menghasilkan distribusi yang lebih sesuai bagi analisis statistik. Ukuran pemerintah daerah dirumuskan sebagai:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)} = \text{Ln (Total Aset)}$$

dengan Ln adalah logaritma natural dan Total Aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan. Nilai SIZE yang lebih



tinggi menunjukkan pemerintah daerah mengelola sumber daya ekonomi yang lebih besar. Penggunaan logaritma juga memberi tafsir yang berguna: koefisien regresi pada SIZE menggambarkan perubahan variabel kinerja untuk setiap kenaikan satu satuan logaritma aset, atau kira-kira seperseratus koefisien tersebut untuk setiap kenaikan aset sebesar satu persen.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, dan mencapai tujuan pembangunan. Putri dan Erwati (2025) menjelaskan bahwa kinerja keuangan menggambarkan tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah di bidang keuangan berdasarkan indikator yang ditetapkan, yang lazim diukur melalui analisis rasio atas laporan realisasi anggaran. Rahareng dkk. (2026) menunjukkan bahwa analisis dapat memakai rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas sehingga kondisi keuangan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pakaya dkk. (2025) dan Cheryll dkk. (2025) memakai gabungan rasio serupa untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini menjadikan rasio efisiensi keuangan daerah sebagai indikator utama karena tujuan penelitian adalah melihat kemampuan pemerintah kabupaten mengendalikan penggunaan belanja relatif terhadap pendapatan yang direalisasikan. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja Daerah} \div \text{Realisasi Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Semakin rendah persentase rasio, semakin efisien penggunaan keuangan daerah, sebab belanja yang dipakai relatif lebih kecil daripada pendapatan yang berhasil direalisasikan. Penggunaan rasio efisiensi sebagai ukuran kinerja juga dijumpai pada penelitian terbaru, misalnya Rosa dan Bhilawa (2026) pada 34 provinsi periode 2020–2023. Kriteria interpretasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi	Kriteria
< 100%	Efisien
= 100%	Efisien berimbang
> 100%	Tidak efisien

Rasio efisiensi tetap harus ditafsirkan hati-hati. Rosa dan Bhilawa (2026) mengingatkan bahwa rasio dalam laporan keuangan belum tentu sepenuhnya mencerminkan capaian pelayanan dan hasil pembangunan. Belanja yang rendah dapat berarti penghematan nyata, tetapi dapat pula berarti pelayanan yang tidak terlaksana. Karena itu, penelitian ini melengkapi rasio efisiensi dengan dua indikator pendukung. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah mencapai target pendapatan, sedangkan rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahan dengan sumber pendapatan yang dimilikinya sendiri. Untuk kedua rasio pendukung ini, nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik, berkebalikan dengan rasio efisiensi.

Dalam perspektif keagenan, rasio efisiensi memberi informasi tentang bagaimana agent menggunakan sumber daya dalam satu periode. Pemerintah yang mampu mengendalikan belanja terhadap pendapatan menunjukkan kemampuan pengelolaan yang lebih baik, sedangkan rasio yang tinggi menandakan perlunya evaluasi pengelolaan anggaran, terutama jika belanja melampaui pendapatan terealisasi. Pemerintah sebagai agent harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai principal.



2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menguji hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan belum menghasilkan kesimpulan seragam. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, sebagian tidak menemukan pengaruh signifikan, dan sebagian lain menemukan pengaruh negatif. Ringkasan studi yang relevan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Objek dan periode	Temuan mengenai ukuran pemerintah
Millenia (2022)	Kabupaten/kota Sumatera Selatan, 2016–2020	Tidak berpengaruh signifikan
Erawati & Kelep (2023)	Kabupaten Lembata, 2012–2021	Tidak berpengaruh
Tandiseru & Pesudo (2023)	Kabupaten/kota Pulau Sulawesi	Positif dan signifikan
Putri & Hendaris (2025)	27 pemerintah daerah Jawa Barat, 2019–2023	Positif dan signifikan
Fatimah & Rizal (2026)	Kabupaten/kota Sumatera Utara, 2020–2023	Positif
Elita dkk. (2026)	Pemerintah provinsi Indonesia	Positif dan signifikan
Tarigan dkk. (2026)	Kabupaten/kota Provinsi Jambi	Tidak berpengaruh
Ramadhan dkk. (2026)	Pemerintah provinsi Indonesia	Negatif dan signifikan

Sumber: diolah dari skripsi sumber dan daftar pustaka.

Pola pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa arah pengaruh berbeda menurut objek, periode, dan indikator kinerja. Tiga hal dapat dicatat. Pertama, studi yang menemukan pengaruh positif cenderung memakai sampel yang cukup besar dan indikator kinerja yang bervariasi. Kedua, studi yang tidak menemukan pengaruh umumnya berfokus pada satu provinsi atau kabupaten tunggal dengan karakteristik fiskal yang relatif homogen. Ketiga, temuan negatif pada level provinsi menunjukkan bahwa tambahan ukuran dapat disertai penurunan kinerja ketika kapasitas pengelolaan tidak mengikuti. Heterogenitas ini menjadi alasan untuk menguji hubungan tersebut pada karakteristik daerah yang berbeda, termasuk kabupaten di daerah otonomi baru seperti Papua Barat Daya.

2.5 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Kerangka konseptual penelitian disusun berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu. Ukuran pemerintah daerah (X) menunjukkan skala sumber daya yang dikelola, sedangkan kinerja keuangan (Y) menunjukkan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Hubungan keduanya digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Ukuran Pemerintah Daerah (X) = Ln Total Aset → Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) = rasio efisiensi (utama); rasio efektivitas dan kemandirian (pendukung)

Pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar memiliki kapasitas lebih luas untuk menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan pelayanan, menjalankan program pembangunan, dan menggali sumber pendapatan. Dalam kerangka keagenan, sumber daya yang lebih memadai membantu agent melaksanakan tanggung jawab kepada principal, sepanjang sumber daya itu dikelola secara efektif dan diawasi secara memadai. Studi Putri dan Hendaris (2025), Tandiseru dan Pesudo (2023), serta Fatimah dan Rizal (2026) mendukung arah positif tersebut, sedangkan Millenia (2022) dan Tarigan dkk. (2026) menunjukkan bahwa hubungan itu tidak selalu muncul. Karena dasar teoretis dan mayoritas bukti pada kabupaten/kota mengarah positif, hipotesis penelitian dirumuskan searah:

**H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.**

Karena rasio efisiensi bersifat "semakin rendah semakin baik", pengaruh positif terhadap kinerja berarti koefisien SIZE bertanda negatif pada rasio efisiensi (kenaikan ukuran diikuti penurunan rasio), dan bertanda positif pada rasio efektivitas dan rasio kemandirian. Konvensi tanda ini digunakan konsisten pada seluruh bagian hasil.

2.6 Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Pelaporan Keuangan Daerah

Hubungan ukuran dan kinerja keuangan hanya dapat dipahami dengan baik jika dilihat dari kerangka kelembagaan yang membentuk data keuangan daerah. Desentralisasi fiskal melimpahkan kewenangan pengelolaan pendapatan dan belanja kepada pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain yang sah. Daerah yang basis ekonominya sempit, seperti sebagian besar daerah di Tanah Papua, cenderung bertumpu pada dana transfer, sedangkan kewenangan belanjanya tetap luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menempatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai ukuran kualitas pengelolaan keuangan, sehingga kinerja keuangan tidak cukup dibaca dari besarnya anggaran.

Informasi keuangan pemerintah daerah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperiksa oleh BPK. Dua komponen LKPD paling relevan bagi penelitian ini. Pertama, Neraca, yang memuat total aset berupa aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya; komponen inilah yang menjadi dasar pengukuran ukuran pemerintah daerah. Kedua, Laporan Realisasi Anggaran, yang memuat anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja; komponen ini menjadi dasar penghitungan rasio efisiensi dan efektivitas. Karena kedua variabel berasal dari dua laporan yang berbeda, hubungan keduanya tidak otomatis bersifat mekanis, tetapi keduanya tetap dihasilkan oleh sistem pencatatan yang sama sehingga kualitas pencatatan memengaruhi keduanya sekaligus.

Ada tiga catatan penting tentang total aset sebagai proksi ukuran. Pertama, nilai aset tetap bergantung pada kebijakan pencatatan, penyusutan, dan penilaian; kegiatan inventarisasi, penertiban, atau penilaian ulang barang milik daerah dapat mengubah nilai tercatat tanpa perubahan nyata pada sumber daya yang dikelola. Kedua, aset dalam jumlah besar belum tentu produktif; aset yang menganggur atau tidak terpelihara menambah angka pada neraca tetapi tidak menambah kapasitas pelayanan. Ketiga, pada daerah yang baru dimekarkan, pengalihan aset dari daerah induk dapat menaikkan total aset secara mendadak. Ketiga hal ini berarti bahwa perubahan $\ln$ total aset dari tahun ke tahun perlu dibaca bersama catatan atas laporan keuangan, bukan sebagai ukuran kapasitas yang murni.

Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan yang diaudit menjadi sarana utama bagi principal untuk menilai agent. Opini audit menilai kewajaran penyajian, sedangkan rasio kinerja menilai hasil pengelolaan. Kedua informasi saling melengkapi: pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP sekaligus memiliki rasio efisiensi yang memburuk, dan sebaliknya. Itulah sebabnya penelitian ini menggunakan rasio keuangan, bukan opini audit, sebagai indikator kinerja, dan itu pula alasan mengapa temuan tentang ukuran pemerintah daerah perlu dibandingkan dengan indikator tata kelola lain pada penelitian lanjutan.



METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (asosiatif). Menurut Sugiyono (2022), pendekatan kuantitatif dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis. Pendekatan eksplanatori dipilih karena tujuan penelitian adalah menjelaskan hubungan dan menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.

3.2 Objek, Populasi, dan Sampel

Objek penelitian adalah pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, dan Raja Ampat. Populasi penelitian adalah seluruh data keuangan pemerintah kabupaten tersebut yang berkaitan dengan ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan selama 2020–2024. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh, yakni seluruh anggota populasi dijadikan sampel, karena populasi hanya terdiri atas lima kabupaten. Dengan lima kabupaten yang diamati selama lima tahun, diperoleh 25 observasi dengan struktur panel seimbang (balanced panel). Pemerintah Kota Sorong tidak termasuk dalam sampel karena penelitian ini berfokus pada pemerintah kabupaten.

3.3 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif sekunder berbentuk angka yang dapat diukur dan dianalisis dengan metode statistik (Sugiyono, 2022). Pada rancangan penelitian aktual, teknik pengumpulan data adalah dokumentasi: total aset diambil dari Neraca dalam LKPD, sedangkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja diambil dari Laporan Realisasi Anggaran, dengan pelengkap berupa publikasi statistik keuangan pemerintah daerah. Data tersebut kemudian diseleksi, dicatat sesuai kebutuhan masing-masing variabel, dan diolah secara kuantitatif.

Namun, data yang dianalisis dalam naskah ini adalah **data simulasi** yang disusun mengikuti struktur LKPD. Nilai-nilainya tidak berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit. Pembaca perlu mencermati bahwa seluruh angka bergerak sangat mulus dari tahun ke tahun dan dibulatkan pada satuan yang rapi; pola seperti ini tidak lazim pada data keuangan riil dan menjadi salah satu alasan mengapa hasil berikut tidak boleh ditafsirkan sebagai temuan faktual. Fungsi data simulasi di sini adalah menguji bahwa seluruh rangkaian prosedur analisis berjalan secara logis dan dapat direplikasi.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki satu variabel independen (ukuran pemerintah daerah) dan satu variabel dependen (kinerja keuangan) yang diwakili tiga rasio, seperti dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran	Skala
Ukuran Pemerintah Daerah (X)	Besar kecilnya pemerintah daerah berdasarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki	SIZE = Ln (Total Aset)	Rasio



Variabel	Definisi operasional	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan (Y1), indikator utama	Kemampuan mengendalikan belanja relatif terhadap pendapatan terealisasi	Rasio efisiensi = $(\text{Realisasi belanja} \div \text{Realisasi pendapatan}) \times 100\%$; semakin rendah semakin baik	Rasio
Kinerja Keuangan (Y2), pendukung	Kemampuan mencapai target pendapatan	Rasio efektivitas = $(\text{Realisasi pendapatan} \div \text{Target pendapatan}) \times 100\%$; semakin tinggi semakin baik	Rasio
Kinerja Keuangan (Y3), pendukung	Kemampuan membiayai pemerintahan dengan sumber pendapatan sendiri	Rasio kemandirian; semakin tinggi semakin baik	Rasio

Sumber: dirumuskan dari skripsi sumber.

3.5 Spesifikasi Model Regresi Data Panel

Karena data terdiri atas lima kabupaten yang diamati selama lima tahun, analisis utama memakai regresi data panel yang menggabungkan dimensi lintas-individu (cross section) dan deret waktu (time series). Model dasar yang digunakan adalah:

$$Y(it) = \alpha + \beta \text{ SIZE}(it) + \varepsilon(it)$$

dengan $Y(it)$ adalah kinerja keuangan kabupaten ke- i pada tahun ke- t , α konstanta, β koefisien ukuran pemerintah daerah, $\text{SIZE}(it)$ adalah Ln total aset, dan $\varepsilon(it)$ galat. Regresi panel memiliki tiga pendekatan: Common Effect Model (CEM), yang mengasumsikan intersep dan kemiringan sama untuk semua kabupaten; Fixed Effect Model (FEM), yang membolehkan intersep berbeda antarkabupaten sehingga α menjadi $\alpha(i)$; dan Random Effect Model (REM), yang memperlakukan perbedaan antarkabupaten sebagai komponen galat acak. Pada FEM, perbedaan karakteristik tetap tiap kabupaten, seperti kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan, terserap oleh intersep masing-masing sehingga estimasi β hanya memanfaatkan variasi dalam kabupaten dari waktu ke waktu.

3.6 Pemilihan Model

Pemilihan model dilakukan dengan tiga uji. Uji Chow membandingkan CEM dengan FEM menggunakan probabilitas Cross-section F; jika $p < 0,05$ maka FEM dipilih. Uji Hausman membandingkan FEM dengan REM menggunakan probabilitas Cross-section Random; jika $p < 0,05$ maka FEM dipilih, dan jika $p > 0,05$ maka REM dipilih. Uji Lagrange Multiplier (Breusch–Pagan) membandingkan CEM dengan REM; jika $p < 0,05$ maka REM dipilih. Dengan hanya lima kabupaten, komponen varians individu pada REM diestimasi dari lima titik saja sehingga kurang stabil. Bila statistik Hausman tidak dapat dihitung secara klasik karena selisih matriks varians tidak definit positif, FEM dipilih sebagai spesifikasi utama karena konsisten terlepas dari ada tidaknya korelasi antara efek individu dan regresor, sedangkan REM dilaporkan sebagai uji ketahanan (robustness).

3.7 Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan pada model terpilih. Normalitas residual diuji dengan Jarque–Bera; residual normal jika $p > 0,05$. Heteroskedastisitas diuji dengan uji Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen; tidak ada heteroskedastisitas jika $p > 0,05$. Autokorelasi diperiksa dengan statistik Durbin–Watson, di mana nilai di sekitar



2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi; pada model panel statistik dihitung di dalam masing-masing kabupaten. Uji multikolinearitas tidak diperlukan karena model hanya memiliki satu variabel independen.

3.8 Pengujian Hipotesis

Signifikansi pengaruh diuji dengan uji t pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hipotesis nol (H_0) menyatakan $\beta = 0$ dan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Mengikuti konvensi tanda pada bagian 2.5, H_1 didukung apabila $p < 0,05$ dan tanda koefisien negatif pada rasio efisiensi (atau positif pada rasio efektivitas dan kemandirian). Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi variasi kinerja yang dijelaskan model. Statistik F dilaporkan sebagai ukuran kelayakan model secara keseluruhan; karena hanya ada satu regresor, F tidak ditafsirkan sebagai pengaruh simultan.

3.9 Perangkat Analisis

Skripsi sumber merencanakan pengolahan data dengan perangkat lunak EViews. Estimasi dalam naskah ini dihitung ulang langsung dari tabel data panel menggunakan prosedur standar (estimator within untuk FEM, estimator Swamy–Arora untuk REM, dan statistik Chow, Hausman, serta Breusch–Pagan menurut rumus baku) dengan bantuan pustaka numerik Python. Hasilnya dapat diverifikasi dengan menjalankan model yang sama di EViews atau perangkat lain, dan verifikasi tersebut sangat dianjurkan ketika data aktual telah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri atas lima pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Kelimanya dipilih karena merupakan seluruh kabupaten di provinsi tersebut dan memiliki karakteristik pemerintahan serta kondisi sosial ekonomi yang beragam. Ringkasan objek disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Profil Objek Penelitian

No.	Kabupaten	Provinsi	Status	Fokus penelitian
1	Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya	Pemerintah daerah otonom	Ukuran pemerintah dan kinerja keuangan
2	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat Daya	Pemerintah daerah otonom	Ukuran pemerintah dan kinerja keuangan
3	Kabupaten Maybrat	Papua Barat Daya	Pemerintah daerah otonom	Ukuran pemerintah dan kinerja keuangan
4	Kabupaten Tambrauw	Papua Barat Daya	Pemerintah daerah otonom	Ukuran pemerintah dan kinerja keuangan
5	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat Daya	Pemerintah daerah otonom	Ukuran pemerintah dan kinerja keuangan

Sumber: diolah dari skripsi sumber.

Kabupaten Sorong memiliki posisi penting dalam perkembangan ekonomi dan pemerintahan provinsi, dan aktivitas pemerintahan serta pembangunannya menuntut dukungan sumber daya yang besar. Kabupaten Sorong Selatan memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan pelayanan yang berbeda, sehingga kebutuhan sarana, prasarana, dan aset pun berbeda. Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw memiliki kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya dan aset daerah. Kabupaten



Raja Ampat berciri kepulauan dengan potensi sumber daya daerah yang menentukan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publiknya. Perbedaan karakteristik ini menjadi alasan mengapa perbandingan lima kabupaten bermanfaat: ukuran pemerintah daerah tidak dapat dibaca hanya dari luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi dari sumber daya ekonomi yang dikelola, dan pemerintah daerah yang beraset besar belum tentu berkinerja keuangan lebih baik.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data terdiri atas ukuran pemerintah daerah sebagai variabel independen dan tiga rasio kinerja keuangan sebagai variabel dependen, dengan 25 observasi (5 kabupaten $\times$ 5 tahun). Tabel 6 menyajikan data panel lengkap, termasuk nilai Ln total aset yang dihitung dari total aset.

Tabel 6. Data Panel Simulasi Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2024

No.	Kabupaten	Tahun	Total aset (Rp miliar)	Ln total aset	Efektivitas (%)	Efisiensi (%)	Kemandirian (%)
1	Sorong	2020	3.100	28,76	94,0	84,0	23,0
2	Sorong	2021	3.320	28,83	96,5	83,5	24,0
3	Sorong	2022	3.580	28,91	97,5	82,5	25,0
4	Sorong	2023	3.910	28,99	98,0	81,0	26,0
5	Sorong	2024	4.250	29,08	100,0	79,5	27,0
6	Sorong Selatan	2020	1.620	28,11	90,0	88,0	15,0
7	Sorong Selatan	2021	1.750	28,19	92,5	86,5	16,0
8	Sorong Selatan	2022	1.890	28,27	92,5	86,5	17,0
9	Sorong Selatan	2023	2.050	28,35	94,0	85,0	18,0
10	Sorong Selatan	2024	2.220	28,43	96,0	83,5	19,0
11	Maybrat	2020	1.780	28,21	88,0	90,0	13,0
12	Maybrat	2021	1.920	28,28	90,5	88,5	14,0
13	Maybrat	2022	2.070	28,36	90,5	88,5	15,0
14	Maybrat	2023	2.240	28,44	92,0	87,0	16,0
15	Maybrat	2024	2.430	28,52	94,0	85,5	17,0
16	Tambrau	2020	1.450	28,00	86,0	92,0	10,0
17	Tambrau	2021	1.570	28,08	88,5	90,5	11,0
18	Tambrau	2022	1.700	28,16	88,5	90,5	12,0
19	Tambrau	2023	1.860	28,25	90,0	89,0	13,0
20	Tambrau	2024	2.030	28,34	92,0	87,5	14,0
21	Raja Ampat	2020	2.480	28,54	92,0	86,0	20,0
22	Raja Ampat	2021	2.670	28,61	94,5	84,5	21,0
23	Raja Ampat	2022	2.880	28,69	95,5	84,5	22,0
24	Raja Ampat	2023	3.120	28,77	96,0	83,0	23,0
25	Raja Ampat	2024	3.390	28,85	98,0	81,5	24,0

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Tabel 6 memperlihatkan dua pola yang langsung terbaca. Pertama, total aset seluruh kabupaten meningkat setiap tahun; kenaikan ini dapat mencerminkan penambahan aset tetap, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan sumber daya ekonomi lain yang dikelola pemerintah daerah. Kedua, rasio efektivitas dan kemandirian cenderung naik sedangkan rasio efisiensi cenderung turun pada seluruh kabupaten. Untuk rasio efisiensi, penurunan berarti



perbaikan karena belanja yang dipakai semakin kecil relatif terhadap pendapatan terealisasi. Seluruh nilai rasio efisiensi berada di bawah 100% sehingga, menurut Tabel 2, seluruh observasi ber kriteria efisien.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 7 merangkum nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku seluruh variabel. Statistik dihitung ulang dari 25 observasi pada Tabel 6.

Tabel 7. Statistik Deskriptif (N = 25)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan baku
Total aset (Rp triliun)	1,450	4,250	2,451	0,787
Ln total aset	28,00	29,08	28,48	0,31
Rasio efektivitas (%)	86,0	100,0	93,08	3,59
Rasio efisiensi (%)	79,5	92,0	85,94	3,25
Rasio kemandirian (%)	10,0	27,0	18,20	5,02

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Rata-rata total aset sebesar Rp2,451 triliun menunjukkan bahwa kelima pemerintah kabupaten secara umum mengelola aset dalam jumlah besar, dengan rentang dari Rp1,450 triliun hingga Rp4,250 triliun. Setelah transformasi logaritma, rentang itu menyempit menjadi 28,00 hingga 29,08 dengan simpangan baku 0,31, yang menunjukkan bahwa skala data sudah mudah ditangani dalam regresi. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 85,94% berarti rata-rata kabupaten membelanjakan sekitar 86 rupiah untuk setiap 100 rupiah pendapatan terealisasi. Rasio kemandirian memiliki variasi relatif terbesar (simpangan baku 5,02 pada rata-rata 18,20), yang sejalan dengan gambaran bahwa kapasitas daerah menggali pendapatan sendiri sangat berbeda antarkabupaten.

4.4 Perbandingan Antarkabupaten dan Antartahun

Tabel 8 membandingkan rata-rata lima tahun setiap kabupaten, diurutkan menurut rata-rata total aset.

Tabel 8. Rata-Rata Ukuran dan Kinerja Keuangan menurut Kabupaten, 2020–2024

Kabupaten	Rata-rata total aset (Rp triliun)	Rata-rata Ln aset	Efektivitas (%)	Efisiensi (%)	Kemandirian (%)
Sorong	3,632	28,91	97,2	82,1	25,0
Raja Ampat	2,908	28,69	95,2	83,9	22,0
Maybrat	2,088	28,36	91,0	87,9	15,0
Sorong Selatan	1,906	28,27	93,0	85,9	17,0
Tambrau	1,722	28,17	89,0	89,9	12,0

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Kabupaten Sorong memiliki rata-rata aset terbesar (Rp3,632 triliun) sekaligus kinerja terbaik pada ketiga rasio: efektivitas 97,2%, efisiensi 82,1% (terendah, berarti terbaik), dan kemandirian 25,0%. Kabupaten Tambrau berada di ujung yang berlawanan dengan aset terkecil (Rp1,722 triliun) dan kinerja terendah pada ketiga rasio. Kabupaten Raja Ampat menempati posisi kedua baik pada ukuran maupun kinerja. Urutan ini cocok dengan harapan hipotesis, tetapi tidak sempurna. Kabupaten Maybrat memiliki aset rata-rata lebih besar daripada Kabupaten Sorong Selatan (Rp2,088 triliun dibanding Rp1,906 triliun), namun kinerjanya lebih rendah pada ketiga rasio. Penyimpangan ini menjadi pengingat bahwa ukuran



bukan satu-satunya penentu kinerja dan bahwa kemampuan mengelola aset sama pentingnya dengan besarnya aset.

Dari sisi waktu, total aset tumbuh sekitar 36,5% hingga 40,0% selama 2020–2024 pada seluruh kabupaten, atau sekitar 8,1% hingga 8,8% per tahun secara majemuk. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Tambrauw (40,0%) dan terendah di Kabupaten Maybrat (36,5%). Karena laju pertumbuhan relatif sama di semua kabupaten, selisih ukuran antarkabupaten relatif stabil sepanjang periode. Tabel 9 menunjukkan rata-rata kelima kabupaten menurut tahun.

Tabel 9. Rata-Rata Lima Kabupaten menurut Tahun

Tahun	Total aset (Rp triliun)	Efektivitas (%)	Efisiensi (%)	Kemandirian (%)
2020	2,086	90,00	88,00	16,2
2021	2,246	92,50	86,70	17,2
2022	2,424	92,90	86,50	18,2
2023	2,636	94,00	85,00	19,2
2024	2,864	96,00	83,50	20,2

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Rata-rata total aset naik sekitar 37% selama periode pengamatan, sementara rata-rata rasio efisiensi turun 4,5 poin persentase (dari 88,0% menjadi 83,5%), rasio efektivitas naik 6,0 poin, dan rasio kemandirian naik 4,0 poin. Seluruh variabel bergerak monoton dalam satu arah dari tahun ke tahun. Hal ini penting dicatat untuk pembahasan selanjutnya, sebab ketika aset dan kinerja sama-sama menunjukkan tren, hubungan statistik yang kuat di antara keduanya dapat sebagian berasal dari tren bersama dan bukan dari hubungan sebab-akibat.

Profil kinerja tiap kabupaten. Gambaran per kabupaten memperjelas pola pada Tabel 8 dan Tabel 9. Total aset Kabupaten Sorong naik dari Rp3.100 miliar pada 2020 menjadi Rp4.250 miliar pada 2024 (naik 37,1%); pada periode yang sama rasio efektivitasnya naik dari 94,0% menjadi 100,0%, rasio efisiensi turun dari 84,0% menjadi 79,5%, dan rasio kemandirian naik dari 23,0% menjadi 27,0%. Kabupaten Raja Ampat tumbuh dari Rp2.480 miliar menjadi Rp3.390 miliar (36,7%) dengan efektivitas 92,0% menjadi 98,0%, efisiensi 86,0% menjadi 81,5%, dan kemandirian 20,0% menjadi 24,0%. Kabupaten Maybrat tumbuh dari Rp1.780 miliar menjadi Rp2.430 miliar (36,5%) dengan efektivitas 88,0% menjadi 94,0%, efisiensi 90,0% menjadi 85,5%, dan kemandirian 13,0% menjadi 17,0%. Kabupaten Sorong Selatan tumbuh dari Rp1.620 miliar menjadi Rp2.220 miliar (37,0%) dengan efektivitas 90,0% menjadi 96,0%, efisiensi 88,0% menjadi 83,5%, dan kemandirian 15,0% menjadi 19,0%. Kabupaten Tambrauw tumbuh dari Rp1.450 miliar menjadi Rp2.030 miliar (40,0%) dengan efektivitas 86,0% menjadi 92,0%, efisiensi 92,0% menjadi 87,5%, dan kemandirian 10,0% menjadi 14,0%. Ada satu temuan yang patut dicatat dengan hati-hati. Meskipun laju pertumbuhan aset berbeda (36,5% hingga 40,0%), perbaikan kinerja selama lima tahun identik pada kelima kabupaten: rasio efektivitas naik tepat 6,0 poin, rasio efisiensi turun tepat 4,5 poin, dan rasio kemandirian naik tepat 4,0 poin. Kabupaten Tambrauw, yang asetnya tumbuh paling cepat, tidak mencatat perbaikan lebih besar daripada kabupaten lain. Pada data riil, keseragaman semacam ini hampir mustahil terjadi, dan secara statistik berarti bahwa variasi antarkabupaten dalam besarnya perbaikan nyaris nol. Akibatnya, seluruh kekuatan hubungan pada model panel berasal dari kesamaan arah gerak waktu, bukan dari selisih pertumbuhan aset yang berkaitan dengan selisih perbaikan kinerja. Inilah yang menjelaskan mengapa uji ketahanan pada bagian 4.9 menghilangkan pengaruh ukuran begitu efek tahun dikendalikan.

Sebaliknya, perbedaan tingkat antarkabupaten sangat jelas: pada 2024, Kabupaten Sorong berefisiensi 79,5% sedangkan Kabupaten Tambrauw 87,5%, selisih 8,0 poin; pada kemandirian, selisih keduanya 13,0 poin (27,0% berbanding 14,0%). Perbedaan tingkat inilah



yang ditangkap oleh model CEM, dan karena itu CEM menghasilkan koefisien yang lebih kecil daripada FEM, yang hanya memakai variasi dalam kabupaten.

4.5 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model dilakukan pada rasio efisiensi sebagai indikator utama. Hasil ketiga uji disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Pemilihan Model (Variabel Dependen: Rasio Efisiensi)

Uji	Statistik	Probabilitas	Keputusan
Chow (CEM vs FEM)	$F(4, 19) = 57,293$	$< 0,001$	FEM dipilih
Lagrange Multiplier, Breusch–Pagan (CEM vs REM)	28,625	$< 0,001$	REM dipilih
Hausman (FEM vs REM)	Tidak dapat dihitung secara klasik	–	FEM dipilih sebagai model utama

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Uji Chow menolak CEM dengan probabilitas di bawah 0,001, sehingga kabupaten-kabupaten tersebut tidak dapat dianggap memiliki intersep yang sama. Uji Lagrange Multiplier juga menolak CEM. Kedua uji tersebut bersama-sama menunjukkan bahwa spesifikasi dengan efek individu lebih tepat daripada model gabungan. Untuk uji Hausman, ragam estimator FEM (0,472) ternyata sedikit lebih kecil daripada ragam estimator REM (0,477) sehingga selisih matriks varians tidak definit positif dan statistik klasiknya tidak terdefinisi; perangkat lunak seperti EViews pada kondisi ini lazimnya melaporkan nilai 0,000 dengan probabilitas 1,000. Hasil formal uji Hausman karena itu tidak dapat dijadikan dasar keputusan. Sesuai aturan pada bagian 3.6, FEM dipilih sebagai model utama dan REM dilaporkan sebagai pembanding. Pilihan ini wajar mengingat perbedaan estimasi keduanya kecil, sebagaimana terlihat pada Tabel 12.

4.6 Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan pada residual model terpilih (FEM). Hasilnya disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Asumsi (Model FEM, Variabel Dependen: Rasio Efisiensi)

Uji	Statistik	Probabilitas / kriteria	Kesimpulan
Normalitas (Jarque–Bera)	1,101	$0,577 > 0,05$	Residual berdistribusi normal
Heteroskedastisitas (Glejser)	$t = 0,155$	$0,879 > 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi (Durbin–Watson dalam kabupaten)	2,387	Mendekati 2	Tidak terdapat indikasi autokorelasi
Multikolinearitas	–	Satu variabel independent	Tidak diperlukan

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Residual FEM memenuhi asumsi normalitas karena probabilitas Jarque–Bera 0,577 melampaui 0,05. Uji Glejser menghasilkan probabilitas 0,879 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas, dan statistik Durbin–Watson 2,387 berada di sekitar 2 sehingga tidak ada indikasi autokorelasi yang serius. Sebagai pembanding, residual CEM menunjukkan masalah yang tidak muncul pada FEM: uji Glejser pada CEM menghasilkan probabilitas 0,020 (indikasi heteroskedastisitas) dan statistik Durbin–Watson-nya hanya 0,844 (indikasi autokorelasi positif). Selisih ini memperkuat pilihan FEM, sebab efek individu yang tidak dimodelkan pada



CEM tertinggal di dalam galat. Dengan hasil tersebut, model FEM layak dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

4.7 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 12 membandingkan hasil estimasi ketiga pendekatan untuk rasio efisiensi.

Tabel 12. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Variabel Dependen: Rasio Efisiensi)

Keterangan	CEM	FEM (utama)	REM
Koefisien Ln total aset (β)	-9,748	-13,468	-13,095
Galat baku	0,845	0,687	0,690
Statistik t	-11,537	-19,604	-18,968
Probabilitas	< 0,001	< 0,001	< 0,001
R ²	0,853	0,953 (within); 0,989 (LSDV)	–
Statistik F (CEM)	133,1	–	–
Jumlah observasi	25	25	25

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Pada model utama (FEM), persamaan estimasi dapat ditulis sebagai Efisiensi(it) = $\alpha(i)$ – 13,468 SIZE(it), dengan $\alpha(i)$ adalah intersep khusus kabupaten. Koefisien SIZE bertanda negatif dan signifikan. Secara praktis, kenaikan total aset sebesar 10% (kenaikan Ln aset sekitar 0,095) berkaitan dengan penurunan rasio efisiensi sekitar 1,28 poin persentase, dan kenaikan 37% (setara dengan pertumbuhan rata-rata aset selama 2020–2024) berkaitan dengan penurunan sekitar 4,2 poin. Angka terakhir mendekati penurunan rata-rata rasio efisiensi yang teramati pada Tabel 9 (4,5 poin), sehingga model cocok dengan pola data. Koefisien CEM lebih kecil (-9,748) karena mencampur variasi antarkabupaten dengan variasi dalam kabupaten; estimasi FEM dan REM hampir identik (-13,468 dan -13,095), sehingga kesimpulan tidak bergantung pada pilihan di antara keduanya.

4.8 Pengujian Hipotesis

Uji t. Statistik t untuk Ln total aset pada FEM adalah -19,604 dengan probabilitas di bawah 0,001, jauh lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak, dan karena tanda koefisien negatif pada rasio efisiensi (kenaikan ukuran diikuti penurunan rasio, yakni perbaikan efisiensi), H_1 yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diterima pada data simulasi ini.

Koefisien determinasi. R² within sebesar 0,953 berarti bahwa 95,3% variasi rasio efisiensi di dalam kabupaten dari tahun ke tahun dijelaskan oleh perubahan ukuran pemerintah daerah. Apabila efek individu turut dihitung (R² LSDV), nilai tersebut menjadi 0,989. Pada CEM, R² sebesar 0,853 dengan statistik F 133,1 yang signifikan. Nilai-nilai ini sangat tinggi untuk data keuangan pemerintah daerah, dan pada data riil biasanya dijumpai angka jauh lebih rendah karena kinerja keuangan juga dipengaruhi PAD, dana transfer, struktur belanja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pengelolaan. Tingginya R² di sini mencerminkan sifat data simulasi yang bergerak mulus dan seragam, bukan kekuatan hubungan di dunia nyata. Karena hanya ada satu regresor, uji F pada model ini setara dengan kuadrat uji t dan tidak memberi informasi tambahan.

4.9 Indikator Pendukung dan Uji Ketahanan

Indikator pendukung. Untuk memeriksa apakah kesimpulan bergantung pada satu rasio, model yang sama diestimasi pada rasio efektivitas dan kemandirian (Tabel 13).

Tabel 13. Hasil Estimasi untuk Indikator Pendukung (Koefisien Ln Total Aset)



Variabel dependen	CEM: β (t)	FEM: β (t)	REM: β (t)	R ² within (FEM)	Chow (p)
Rasio efektivitas	10,704 (10,980)	16,898 (16,488)	15,640 (14,557)	0,935	< 0,001
Rasio kemandirian	15,721 (17,181)	12,531 (104,528)	12,539 (102,463)	0,998	< 0,001

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026). Seluruh koefisien signifikan pada $p < 0,001$.

Koefisien pada kedua rasio bertanda positif dan signifikan pada seluruh spesifikasi, searah dengan hipotesis. Namun, statistik t sebesar 104,5 pada rasio kemandirian terlalu besar untuk data riil dan menunjukkan bahwa data hampir deterministik: pada Tabel 6, rasio kemandirian setiap kabupaten naik tepat satu poin persentase setiap tahun. Ini adalah petunjuk jelas bahwa angka-angka tersebut disusun secara buatan.

Uji ketahanan terhadap tren waktu. Karena seluruh variabel bergerak naik atau turun secara monoton (Tabel 9), perlu diuji apakah hubungan ukuran–kinerja bertahan setelah pengaruh waktu dikendalikan. Tiga spesifikasi tambahan dijalankan: FEM dua arah (efek kabupaten dan efek tahun), FEM dengan tren linear, dan model selisih pertama (first difference). Hasilnya disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Uji Ketahanan untuk Rasio Efisiensi dan Efektivitas (Koefisien Ln Total Aset)

Spesifikasi	Efisiensi: β (p)	Efektivitas: β (p)
FEM satu arah (utama)	-13,468 (< 0,001)	16,898 (< 0,001)
FEM dua arah (kabupaten + tahun)	-7,121 (0,526)	-7,971 (0,563)
FEM dengan tren linear	-34,001 (0,051)	-11,256 (0,650)
Selisih pertama (first difference)	-57,183 (0,035)	-17,887 (0,667)

Sumber: data simulasi, diolah peneliti (2026).

Hasilnya tegas: begitu pengaruh waktu dikendalikan, koefisien ukuran pemerintah daerah tidak lagi signifikan pada hampir seluruh spesifikasi, ukurannya berubah sangat jauh (dari -7 hingga -57 untuk efisiensi), dan pada rasio efektivitas tandanya bahkan berbalik. Untuk rasio kemandirian, variasi dalam kabupaten sepenuhnya merupakan fungsi waktu (tren sebesar 1,000 poin per tahun), sehingga pengaruh ukuran tidak dapat dibedakan dari waktu. Hanya model selisih pertama dan model dengan tren pada rasio efisiensi yang menghasilkan koefisien bertanda negatif dengan signifikansi sekitar 5%, dan keduanya tidak stabil. Kesimpulannya, hubungan kuat pada FEM satu arah sebagian besar mencerminkan fakta bahwa aset dan kinerja sama-sama bergerak sesuai waktu. Data simulasi ini tidak cukup untuk memisahkan efek ukuran dari efek waktu.

4.10 Pembahasan

Hasil estimasi utama menunjukkan bahwa, pada data simulasi, kabupaten dengan ukuran lebih besar berkaitan dengan rasio efisiensi lebih rendah (kinerja lebih baik), rasio efektivitas lebih tinggi, dan rasio kemandirian lebih tinggi. Pola ini juga tampak pada perbandingan antarkabupaten: Kabupaten Sorong menempati posisi tertinggi pada ukuran dan kinerja, sedangkan Kabupaten Tambrauw terendah pada keduanya. Arah ini sesuai dengan hipotesis dan dengan penalaran teori keagenan, tetapi pembahasan berikut menegaskan batas tafsir yang layak.

Penjelasan teoretis yang mungkin. Dalam kerangka keagenan, pemerintah daerah dengan aset lebih besar umumnya memiliki sumber daya administratif dan finansial lebih luas untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga agent lebih mampu memenuhi mandat dari principal. Beberapa mekanisme dapat dipertimbangkan sebagai penjelasan yang masuk akal,



meskipun tidak diuji dalam penelitian ini. Aset yang lebih besar dapat menopang kegiatan penghasil pendapatan, misalnya aset jalan, pasar, dan fasilitas pelayanan, sehingga realisasi pendapatan lebih tinggi. Biaya administrasi yang sifatnya tetap dapat tersebar pada basis anggaran yang lebih besar sehingga belanja relatif terhadap pendapatan lebih rendah. Organisasi yang lebih besar juga cenderung memiliki sistem pelaporan dan pengendalian yang lebih mapan karena sorotan pemeriksa dan publik lebih besar. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Tandiseru dan Pesudo (2023) serta Fatimah dan Rizal (2026) yang menemukan pengaruh positif ukuran terhadap kinerja pada kabupaten/kota, dan dengan Putri dan Hendaris (2025) pada pemerintah daerah di Jawa Barat. Temuan ini juga selaras dengan Elita dkk. (2026) pada level provinsi.

Perbedaan dengan penelitian lain. Hasil ini berbeda dari Millenia (2022), Erawati dan Kelep (2023), dan Tarigan dkk. (2026) yang tidak menemukan pengaruh signifikan, dan dari Ramadhan dkk. (2026) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan itu tidak dapat diadjudikasi oleh penelitian ini karena data yang dipakai disimulasikan. Yang dapat dikatakan ialah bahwa heterogenitas temuan terdahulu mengingatkan bahwa hasil positif pada satu spesifikasi tidak otomatis berlaku umum. Hasil uji ketahanan pada Tabel 14 memberi contoh konkret: tanda dan signifikansi koefisien sangat peka terhadap cara waktu dikendalikan, dan kepekaan seperti inilah yang dapat menjelaskan mengapa studi nyata menghasilkan kesimpulan berbeda-beda.

Makna rasio efisiensi pada daerah yang bergantung pada transfer. Pada daerah dengan ketergantungan transfer sangat tinggi, seperti wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang 93,2% pendapatannya berasal dari transfer APBN, rasio efisiensi sebagian besar ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima dari pusat dan oleh belanja yang sifatnya wajib, bukan hanya oleh kehematan pengelolaan. Rasio efisiensi yang membaik dapat terjadi karena pendapatan transfer naik, bukan karena belanja dikendalikan. Struktur belanja yang didominasi belanja barang dan jasa (32,9%) serta belanja pegawai (28,5%) juga menunjukkan bahwa ruang manuver pengelola anggaran terbatas. Karena itu, hasil pada rasio efisiensi sebaiknya dibaca bersama indikator kemandirian dan struktur belanja, dan penelitian lanjutan perlu memasukkan porsi dana transfer serta belanja modal sebagai variabel kontrol.

Ukuran bukan satu-satunya faktor. Perbandingan antarkabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Maybrat beraset lebih besar daripada Kabupaten Sorong Selatan tetapi berkinerja lebih rendah. Contoh ini menunjukkan bahwa aset yang besar belum tentu menghasilkan kinerja yang baik apabila tidak dikelola secara efektif. Hal ini sejalan dengan argumen teoretis bahwa ukuran yang meningkat menambah kompleksitas, kebutuhan koordinasi, dan kebutuhan pengawasan. Dalam perspektif keagenan, tambahan aset menuntut sistem pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasan aset yang memadai agar akuntabilitas tetap terjaga.

Implikasi kebijakan secara hati-hati. Apabila hubungan ini kelak terbukti pada data aktual, implikasinya bukan bahwa pemerintah daerah perlu memperbesar aset demi memperbaiki kinerja, sebab arah sebab-akibat belum diuji dan aset dapat membesar sebagai akibat dari kinerja yang baik. Implikasi yang lebih aman adalah bahwa pertumbuhan skala pemerintahan, terutama pada daerah otonomi baru, perlu diiringi penguatan kapasitas pengelolaan: perencanaan, pengelolaan aset, pengawasan anggaran, optimalisasi PAD, dan efisiensi belanja. Prioritas ini sejalan dengan saran dalam penelitian ini, dan dengan kebutuhan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai principal.



4.11 Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi teoretis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori keagenan pada hubungan ukuran dan kinerja menghasilkan dua prediksi yang berlawanan: ukuran besar memberi kapasitas, tetapi juga memperbesar kompleksitas dan biaya pengawasan. Data simulasi memperlihatkan prediksi pertama pada spesifikasi sederhana, sedangkan uji ketahanan memperlihatkan bahwa prediksi itu tidak dapat dibedakan dari pengaruh waktu. Bagi literatur, pelajaran terpentingnya bersifat metodologis: studi tentang ukuran pemerintah daerah yang memakai data berderet waktu pendek perlu melaporkan hasil dengan dan tanpa kontrol efek waktu, sebab keduanya dapat menghasilkan kesimpulan yang berlawanan. Pelajaran lain adalah perlunya definisi kinerja yang konsisten; rasio efisiensi, efektivitas, dan kemandirian mengukur dimensi yang berbeda dan tidak boleh dilebur dalam satu indeks tanpa rumus yang dinyatakan secara terbuka.

Implikasi bagi pemerintah kabupaten. Jika pola serupa kelak terbukti pada data aktual, pemerintah kabupaten di Papua Barat Daya perlu memandang pertumbuhan aset sebagai tambahan tanggung jawab pengelolaan. Beberapa langkah relevan: memperkuat inventarisasi dan pemeliharaan aset sehingga nilai pada neraca mencerminkan sumber daya yang benar-benar berfungsi; menyusun target pendapatan yang realistis agar rasio efektivitas bermakna; mengendalikan belanja rutin yang menyerap bagian besar anggaran; dan meningkatkan PAD agar ketergantungan pada transfer berkurang. Pemerintah kabupaten juga perlu memantau rasio kinerja secara berkala, bukan hanya mengejar opini audit.

Implikasi bagi pemerintah provinsi dan pengawas. Provinsi baru seperti Papua Barat Daya membutuhkan basis data keuangan yang seragam dan tepat waktu agar perbandingan antardaerah dapat dilakukan. Kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan menjadi prasyarat agar daerah ini dapat masuk dalam penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah nasional. Pembina dan pengawas dapat memakai kerangka analisis dalam naskah ini sebagai daftar pemeriksaan awal, dengan catatan bahwa penilaian akhir harus berpijak pada data yang telah diaudit.

4.12 Agenda Replikasi dengan Data Aktual

Untuk mengubah naskah ini dari demonstrasi prosedur menjadi bukti empiris, langkah berikut disarankan secara berurutan.

1. **Kumpulkan data yang diaudit.** Ambil total aset dari Neraca dan realisasi pendapatan serta belanja dari Laporan Realisasi Anggaran setiap kabupaten untuk 2020–2024 melalui laman resmi pemerintah kabupaten, BPK, atau publikasi statistik keuangan daerah. Simpan angka dalam rupiah penuh dan catat sumber serta halaman setiap angka.
2. **Bentuk variabel sesuai definisi.** Hitung Ln total aset, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian dengan rumus pada Tabel 4. Jika indeks komposit dipakai, nyatakan rumus dan pembobotnya secara terbuka.
3. **Periksa kualitas data.** Cari penyajian ulang (restatement) angka tahun sebelumnya, perubahan kebijakan penilaian aset, pengalihan aset akibat pemekaran, dan nilai ekstrem. Dokumentasikan setiap penyesuaian.
4. **Estimasi dan pilih model.** Jalankan CEM, FEM, dan REM, kemudian uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Laporkan apa adanya bila uji Hausman tidak dapat dihitung.
5. **Kendalikan waktu.** Sertakan efek tahun atau variabel tren dan laporkan hasil dengan dan tanpa kontrol tersebut, sebagaimana Tabel 14.



6. **Tambahkan variabel kontrol.** Masukkan PAD, porsi dana transfer, belanja modal, temuan audit, dan pertumbuhan ekonomi daerah bila tersedia.
7. **Perbesar sampel.** Lima kabupaten terlalu sedikit untuk galat baku yang andal, terutama jika dikelompokkan menurut kabupaten. Perluas ke seluruh kabupaten/kota di provinsi-provinsi baru di Tanah Papua atau gunakan prosedur inferensi yang sesuai untuk jumlah kelompok kecil.
8. **Verifikasi silang.** Jalankan seluruh model di EViews dan perangkat lain, lalu bandingkan koefisien dan statistik ujinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, yang diukur dengan logaritma natural total aset, terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya pada lima kabupaten selama 2020–2024 (25 observasi) dengan regresi data panel. Kesimpulan dirumuskan dalam tiga butir.

Pertama, pada spesifikasi utama (Fixed Effect Model yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Lagrange Multiplier), ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan searah dengan hipotesis. Koefisien Ln total aset terhadap rasio efisiensi sebesar $-13,468$ ($t = -19,604$; $p < 0,001$) dengan R^2 within 0,953, sedangkan pada rasio efektivitas dan kemandirian koefisiennya positif dan signifikan. Dengan demikian H1 diterima pada data simulasi. Residual model memenuhi asumsi normalitas, tidak mengalami heteroskedastisitas, dan tidak menunjukkan autokorelasi.

Kedua, hasil tersebut tidak tahan terhadap pengendalian pengaruh waktu. Setelah efek tahun atau tren waktu dimasukkan, koefisien ukuran pemerintah daerah kehilangan signifikansi pada hampir seluruh spesifikasi dan besarnya berubah sangat jauh. Hubungan kuat pada model utama sebagian besar mencerminkan bahwa aset dan kinerja sama-sama bergerak sesuai waktu, bukan bukti bahwa ukuran menyebabkan kinerja.

Ketiga, karena seluruh data berupa simulasi, naskah ini tidak memberikan bukti empiris tentang kinerja keuangan kabupaten-kabupaten di Papua Barat Daya. Kontribusi naskah ini adalah menyediakan kerangka analisis yang lengkap dan dapat direplikasi, termasuk daftar uji yang perlu dijalankan dan jebakan yang perlu diwaspadai, untuk dipakai ulang dengan data LKPD aktual.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, data bersifat simulasi sehingga seluruh koefisien, statistik uji, dan R^2 tidak boleh ditafsirkan sebagai temuan faktual. Kedua, sampel hanya lima kabupaten dengan 25 observasi, sehingga derajat kebebasan kecil, estimasi komponen varians pada REM kurang stabil, dan uji Hausman tidak dapat dihitung secara klasik. Ketiga, seluruh variabel memiliki tren monoton yang sama sehingga hubungan antarvariabel sulit dipisahkan dari pengaruh waktu. Keempat, model hanya memuat satu regresor sehingga faktor lain seperti porsi dana transfer, PAD, belanja modal, temuan audit, dan pertumbuhan ekonomi tidak dikendalikan. Kelima, arah sebab-akibat belum diuji; aset dapat membesar sebagai akibat dari pengelolaan yang baik dan bukan sebaliknya. Keenam, rasio efisiensi pada daerah yang bergantung pada transfer sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dari pusat sehingga tidak murni mencerminkan kehematan. Ketujuh, estimasi dihitung ulang dengan prosedur standar di luar EViews dan perlu diverifikasi silang.



5.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan data aktual dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran dalam LKPD yang telah diaudit untuk 2020–2024 atau periode yang lebih panjang, dan memperluas sampel, misalnya ke seluruh kabupaten/kota di provinsi daerah otonomi baru di Tanah Papua, agar jumlah observasi cukup. Model sebaiknya memasukkan efek tahun atau variabel waktu, serta variabel kontrol berupa PAD, dana transfer, belanja modal, temuan audit, opini BPK, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan proksi ukuran lain (total pendapatan dan total belanja), menguji ketergantungan antarwaktu dengan variabel tertinggal (lag), dan menjalankan seluruh pengujian di EViews untuk verifikasi.

Bagi pemerintah kabupaten di Papua Barat Daya, disarankan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah agar dimanfaatkan secara optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran terutama dalam pengendalian belanja sesuai prioritas daerah, serta mengoptimalkan potensi PAD agar ketergantungan pada dana transfer pusat berkurang secara bertahap. Bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait, kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan perlu didorong agar daerah di Papua Barat Daya dapat segera diukur dalam indeks pengelolaan keuangan daerah nasional sehingga pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Egbon, T. N., Sokoh, G. C., & Okereka, O. P. (2023). Application of agency theory in administrative accountability and public service delivery in local government councils in Delta State. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 293–298.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Elita, I. P., Hartati, S., & Frymaruwah, E. (2026). The influence of regional original income, government size, and capital expenditure on the financial performance of provincial governments in Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 23(2).
- Fatimah, S., & Rizal, M. (2026). The influence of regional government size, local original revenue, and balancing funds on the financial performance of regency/city regional governments in North Sumatra Province for the 2020–2023 period. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Maheresmi, H., & Rokhimah, S. (2026). An empirical analysis of capital expenditure, government size and legislative size on local government financial performance: Evidence from Indonesian provinces. *Jurnal Ekonomika*, 17(1), 126–136.
- Meilanda, P., Periansya, P., & Armaini, R. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11).
- Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi fiskal, efektivitas penyerapan anggaran, belanja modal, level maturitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah: Kinerja pemerintah daerah sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Nasirwan, N., Ginting, A. B., Manalu, C., & Sinaga, D. A. (2024). The influence of local government size and economic growth on local government financial performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(3), 165–171.



- Ramadhan, A., Rahayu, S., & Wijaya, Z. R. (2026). The influence of government size, intergovernmental transfers, regional expenditure, and audit findings on local government financial performance in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS*, 4(2), 2077–2093.
- Sumardjo, M., & Jayanti, F. D. (2021). Determinants of government characteristics and audit findings on local government financial performance. *Information Management and Business Review*, 13(2[I]), 7–15.
- Tandiseru, A. A. T., & Pesudo, D. A. A. (2023). Pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah, dan temuan audit terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1).

Sumber yang dikutip dalam naskah tetapi belum memiliki data bibliografi lengkap pada skripsi sumber (lengkapi sebelum pengajuan ke jurnal): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (2024); Banunaek dkk. (2022); Cheryll dkk. (2025); Erawati & Kelep (2023); Millenia (2022); Pakaya dkk. (2025); Putri & Erwati (2025); Putri & Hendaris (2025); Rahareng dkk. (2026); RRI (2026); Rosa & Bhilawa (2026); Setiawan & Winarna (2022); Soares dkk. (2025); Sugiyono (2022); Swianiewicz dkk. (2025); Tarigan dkk. (2026); Zamzami & Rakhman (2023).